

TESIS

**KEDUDUKAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG
TIDAK DILIKUIDASI PASCA PROSES KEPAILITAN DALAM
SISTEM PERDATA INDONESIA**

***THE LEGAL STATUS OF AN UNLIQUIDATED LIMITED
LIABILITY COMPANY FOLLOWING BANKRUPTCY
PROCEEDINGS UNDER THE INDONESIAN CIVIL LAW
SYSTEM***



Oleh

ANDRIYAN RAHARDI

NIM. 2410622022

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
JAKARTA**

2026

TESIS

**KEDUDUKAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG
TIDAK DILIKUIDASI PASCA PROSES KEPAILITAN DALAM
SISTEM PERDATA INDONESIA**

***THE LEGAL STATUS OF AN UNLIQUIDATED LIMITED
LIABILITY COMPANY FOLLOWING BANKRUPTCY
PROCEEDINGS UNDER THE INDONESIAN CIVIL LAW
SYSTEM***



Oleh

ANDRIYAN RAHARDI

NIM. 2410622022

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
JAKARTA**

2026

HALAMAN JUDUL

**KEDUDUKAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG
TIDAK DILIKUIDASI PASCA PROSES KEPAILITAN DALAM
SISTEM PERDATA INDONESIA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh:
ANDRIYAN RAHARDI
NIM. 2410622022

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KEDUDUKAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG
TIDAK DILIKUIDASI PASCA PROSES KEPAILITAN DALAM
SISTEM PERDATA INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh:
ANDRIYAN RAHARDI
NIM. 2410622022

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS
Pada Tanggal 3 Juli 2026

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M.

NIDN. 0330016202

Pembimbing II



Dr. Andriyanto Adhi Nugroho, S.H., M.H.

NIDN. 0330018002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Telepon 021-7656971, Fax 021-7656904

Laman : hukum.upnvj.ac.id, e-mail: fh@upnvj.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

KEDUDUKAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK DILIKUIDASI
PASCA PROSES KEPAILITAN DALAM SISTEM PERDATA INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh:

ANDRIYAN RAHARDI

NIM. 2410622022

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Pada Tanggal 17 Juli 2026
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1

Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M.
NIDN. 0330016202

Pembimbing 2

Dr. Andriyanto Adhi Nugroho, S.H., M.H.
NIDN. 0330018002

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Suherman, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

Koordinator Program Studi
Magister Hukum

Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I., S.H.,
M.H.
NIP. 198910192025211048

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andriyan Rahardi

NIM : 2410622022

Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Penulisan Tesis yang berjudul **“Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Tidak Dilikuidasi Pasca Proses Kepailitan Dalam Sistem Perdata Indonesia”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam Penulisan Tesis ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jakarta, 3 Juli 2026

Yang Membuat Pernyataan,

A 1000 Rupiah Indonesian revenue stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "1000", "METERAI TEMPEL", and "DB6BCANX337026893".

Andriyan Rahardi

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andriyan Rahardi

NIM : 2410622022

Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“KEDUDUKAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK DILIKUIDASI PASCA PROSES KEPAILITAN DALAM SISTEM PERDATA INDONESIA”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 3 Juli 2026

Yang Membuat Pernyataan,

A 1000 Rupiah Indonesian revenue stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and 'DB6BCANX337026893'.

Andriyan Rahardi

NIM. 2410622022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Tidak Dilikuidasi Pasca Proses Kepailitan Dalam Sistem Perdata Indonesia”**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Tesis ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kedudukan hukum perseroan terbatas yang tidak dilikuidasi pasca proses kepailitan dalam sistem perdata Indonesia dalam kaitannya dengan mekanisme rehabilitasi debitur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum perseroan dan kepailitan, serta menjadi sumbangan pemikiran dalam upaya memperkuat kepastian hukum di Indonesia.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak mungkin diraih tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Anter Venus, MA.Comm. Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas akademik kepada penulis selama menempuh studi.
2. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah memberikan arahan dan kebijakan yang mendukung proses pembelajaran.
3. Bapak Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I., S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah banyak mengarahkan penulis dalam hal kajian Ilmu Hukum maupun dalam

mengarahkan penulis dalam proses administrasi pengajuan usulan Penelitian.

4. Ibu Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing 1, Dengan penuh ketulusan, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam atas kesabaran, keteguhan, dan perhatian beliau dalam membimbing. Bukan hanya arahan akademik yang diberikan, tetapi juga dorongan moral yang membuat penulis mampu melewati berbagai tantangan dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. Andriyanto Adhi Nugroho, S.H., M.H., , selaku Dosen Pembimbing 2. Penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan terima kasih atas arahan, masukan, dan kesabaran beliau dalam membimbing. Dukungan beliau tidak hanya memperkaya substansi akademik tesis ini, tetapi juga memberikan semangat dan keyakinan bagi penulis untuk terus maju. Kehangatan dan ketegasan beliau dalam membimbing menjadi motivasi yang sangat berarti dalam proses penyelesaian penelitian ini.
6. Ibu Dr. Atik Winanti, S.H., M.H. selaku Penguji 1, yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan berharga demi kesempurnaan penelitian ini.
7. Ibu Dr. Wardani Rizkianti, S.H., M.Kn., selaku Penguji 2, yang telah memberikan evaluasi, arahan, serta masukan konstruktif dalam penyusunan tesis ini.
8. Bapak Yulianto Rahardi dan Ibu Nursyafni Yanti, Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti. Semangat dan motivasi yang selalu diberikan menjadi kekuatan utama dalam menempuh pendidikan hingga terselesaikannya tesis ini. Segala pencapaian ini adalah buah dari doa dan dukungan tulus yang senantiasa mengiringi langkah penulis.
9. Para Pimpinan dan Rekan-rekan Jimly School of Law and Government, sebagai tempat penulis bekerja, yang telah memberikan dukungan moral dan kesempatan untuk tetap produktif dalam dunia akademik.

10. Para Pimpinan dan Rekan-rekan Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI), sebagai tempat penulis bekerja, yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam penyusunan tesis ini.
11. Para Dosen Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu serta wawasan hukum yang bermanfaat.
12. Seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang telah membantu dalam proses akademik dan administratif selama penulis menempuh pendidikan.
13. Rekan-rekan mahasiswa, teman, dan rekan berpikir di Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang telah menjadi teman diskusi dan berbagi semangat.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap kritik maupun saran yang membangun demi perbaikan penelitian ini serta perkembangan ilmu hukum di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, bagi pengembangan ilmu hukum dan menjadi sumbangan pemikiran dalam perbaikan sistem hukum Perseroan Terbatas pasca kepailitan di Indonesia.

Jakarta, 16 Juli 2026

Andriyan Rahardi

ABSTRAK

KEDUDUKAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK DILIKUIDASI PASCA PROSES KEPAILITAN DALAM SISTEM PERDATA INDONESIA

Andriyan Rahardi (2410622022), Diani Sadiawati, Andriyanto Adhi Nugroho

Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum perseroan terbatas yang tidak dilikuidasi pasca proses kepailitan dalam sistem perdata Indonesia. Permasalahan utama penelitian ini terletak pada ketidakselarasan dan ambiguitas pengaturan antara kewajiban pembubaran/likuidasi PT dalam UU PT dan kemungkinan rehabilitasi debitur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta bersifat preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang ada belum memberikan kepastian hukum yang memadai karena terdapat ketidakselarasan antara kewajiban likuidasi setelah insolvensi dan kemungkinan rehabilitasi setelah kepailitan berakhir. Dalam praktik, ketidakselarasan tersebut menimbulkan keadaan perseroan yang secara ekonomi telah berhenti, tetapi secara yuridis belum selesai status badan hukumnya. Kondisi ini berpotensi merugikan kreditor, debitur, pemegang saham, dan pihak ketiga yang berkepentingan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa likuidasi merupakan tahapan penting untuk mengakhiri status badan hukum perseroan secara tertib dan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi norma agar pengaturan mengenai status perseroan pasca kepailitan menjadi lebih jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara efektif dalam praktik. Penelitian ini juga menegaskan bahwa penyelesaian melalui penafsiran sistematis semata belum cukup untuk menghilangkan ambiguitas, sehingga dibutuhkan rumusan kebijakan hukum yang lebih eksplisit. Selain itu, perlindungan hukum terhadap kreditor dan pihak ketiga akan lebih terjamin apabila proses likuidasi dijalankan secara tegas dan berurutan setelah pembubaran perseroan. Karena itu, sinkronisasi norma antara kedua undang-undang tersebut menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah lahirnya perseroan yang secara ekonomi telah berhenti, tetapi secara hukum masih tercatat aktif dalam sistem hukum.

Kata Kunci: Kepailitan; Likuidasi; Perseroan Terbatas; Rehabilitasi; Status Badan Hukum.

ABSTRACT

THE LEGAL STATUS OF AN UNLIQUIDATED LIMITED LIABILITY COMPANY FOLLOWING BANKRUPTCY PROCEEDINGS UNDER THE INDONESIAN CIVIL LAW SYSTEM

Andriyan Rahardi (2410622022), Diani Sadiawati, Andriyanto Adhi Nugroho

This study analyzes the legal status of a limited liability company that remains unliquidated following bankruptcy proceedings under the Indonesian civil law system. The main issue examined in this study lies in the inconsistency and ambiguity of the regulatory framework concerning the obligation to dissolve and liquidate a limited liability company under the Indonesian Company Law and the possibility of debtor rehabilitation under the Indonesian Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, and adopts an analytical-prescriptive nature. The findings indicate that the existing legal framework has not provided adequate legal certainty due to the inconsistency between the obligation to liquidate a company following insolvency and the possibility of rehabilitation after bankruptcy proceedings have ended. In practice, this inconsistency creates a situation in which a company has ceased to operate economically but has not yet completed the legal process concerning its corporate status. Such a condition potentially causes harm to creditors, debtors, shareholders, and other interested third parties. This study concludes that liquidation constitutes an essential stage in formally and orderly terminating the legal entity status of a company and ensuring legal certainty. Therefore, harmonization of the relevant legal norms is necessary to establish a clearer, more consistent, and effectively enforceable framework governing the status of a company following bankruptcy proceedings. This study further emphasizes that resolving the ambiguity solely through systematic interpretation is insufficient; therefore, a more explicit legal policy framework is required. In addition, legal protection for creditors and third parties will be better ensured if the liquidation process is carried out expressly and sequentially following the dissolution of the company. Accordingly, synchronization of the legal norms governing these matters under the two respective laws is urgently needed to prevent the emergence of companies that have ceased to exist economically but remain legally registered as active entities within the legal system.

Keywords: Bankruptcy; Legal Status; Liquidation; Limited Liability Company; Rehabilitation.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoretis	10
2. Manfaat Praktis	11
E. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Kajian Teoretis	20
1. Teori Kepastian Hukum	20
2. Teori Pembentukan Undang-Undang.....	23
B. Kerangka Berpikir	25
C. Definisi Operasional.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Sifat Penelitian	32
D. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum	33
E. Analisis Penelitian.....	33
F. Sumber dan Jenis Data	34
1. Bahan Hukum Primer.....	35
2. Bahan Hukum Sekunder	37
BAB IV PEMBAHASAN.....	38
A. Kedudukan Badan Hukum Perseroan Terbatas Pasca Kepailitan Ditinjau dari Pengaturan mengenai Kewajiban Likuidasi dan Rehabilitasi Debitur	

dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU	38
1. Ketidakselarasan Normatif Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Pasca Kepailitan dalam Perspektif UU PT dan UU Kepailitan dan PKPU	38
2. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan dan Pola Kelalaian Pemenuhan Kewajiban Likuidasi.....	55
B. Kriteria Kewajiban Likuidasi Pasca Kepailitan dan Implikasi Hukum Tidak dilaksanakannya Kewajiban Likuidasi.....	68
1. Kriteria Normatif Kewajiban Likuidasi Perseroan Terbatas dan Implikasi Ketidaanya Pasca Kepailitan dalam Kondisi Insolvensi.....	68
2. Konstruksi Kewajiban Hukum Likuidasi dan Rehabilitasi Terhadap Skenario Berakhirnya Perseroan Terbatas Pasca Pailit	92
BAB V PENUTUP.....	106
A. Simpulan.....	106
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2. Diferensiasi Likuidator dan Kurator	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kepastian Hukum Badan Hukum dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & PKPU Dan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	28
Gambar 2. Pembubaran Perseroan	41
Gambar 3. Proses Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Badan Hukum Perseroan Terbatas Akibat Insolvensi.....	73
Gambar 4. Implikasi Hukum Berakhirnya Kepailitan terhadap Pembubaran, Likuidasi, dan Rehabilitasi Perseroan Terbatas	103